

Masyarakat Polongbangkeng dalam Upaya Penolakan NIT di Polongbangkeng, 1945-1950

Muhammad Risal; M. Rasyid Ridha; La Malihu

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM
jannahashari8@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya penolakan NIT di Polongbangkeng, reaksi masyarakat Polongbangkeng dalam menolak kehadiran NIT, serta untuk mengetahui dampak penolakan NIT di Polongbangkeng. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode Sejarah yang terdiri dari atas empat tahap yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan: Reaksi masyarakat Polongbangkeng pada saat mengetahui keberadaan NICA di wilayah Polongbangkeng tentunya menolak hal tersebut termasuk pembentukan NIT karena menganggap bahwa NIT ini dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka untuk menolak NIT maka dibentuklah LAPRIS yang berkedudukan di Borongkaramasa di Polongbangkeng, yang diketuai oleh Kelaskaran Lipan Bajeng dan pada saat itu di wakili oleh Ranggong Dg. Romo dari Polongbangkeng. Dalam rangka penolakan NIT perjuangan dilakukan kurang lebih 5 tahun (1945-1950) terdapat dua bentuk yaitu perjuangan fisik dan perjuangan non fisik perjuangan ini diperiodesasikan menjadi masa Gerakan Muda Bajeng dan Lipan Bajeng bersama LAPRIS. Adapun Dampak dari penolakan masyarakat Polongbangkeng terhadap NIT dari sisi politik ialah terbentuknya LAPRIS yang merupakan persatuan ke-19 laskar di Sulawesi Selatan yang berfokus pada penolakan pembentukan NIT. Adapun dampak dari sisi ekonomi ialah ditandai dengan besarnya jumlah ekspor beras di Sulawesi Selatan terkhusus di daerah Polongbangkeng.

Kata Kunci: Penolakan; NIT; Polongbangkeng

Abstract

This study aims to determine the background of the emergence of NIT rejection in Polongbangkeng, the reaction of the Polongbangkeng community in refusing the presence of NIT, and to determine the impact of NIT rejection in Polongbangkeng. To achieve this goal, the researcher uses a qualitative research method using the historical method approach which consists of four stages, namely: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate: The reaction of the people of Polongbangkeng when they learned about the existence of NICA in the Polongbangkeng area, of course, rejected this including the formation of the NIT because they thought that this NIT could threaten the independence of Indonesia. In order to reject NIT, LAPRIS was formed based in Borongkaramasa in Polongbangkeng, which was chaired by Kelaskaran Lipan Bajeng and at that time represented by Ranggong Dg. Father from Polongbangkeng. In the context of rejecting the NIT, the

struggle was carried out for approximately 5 years (1945-1950) there were two forms, namely physical struggle and non-physical struggle, this struggle was periodized into the Bajeng Youth Movement and Lipan Bajeng together with LAPRIS. The impact of the rejection of NIT in Polongbangkeng, namely Polongbangkeng from being free from the influence of NICA and the failure of the formation of the State of East Indonesia, on the other hand, the struggle of Lipan Bajeng together with LAPRIS became a reflection in society and gave birth to other revolutionary fighters.

Keywords : NIT; Rejection; Polongbangkeng

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia Timur merupakan contoh kompleks hubungan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Belanda, dan rakyat Indonesia Timur (Bahri et al., 2020). Meskipun tujuan didirikannya Negara Indonesia Timur ialah untuk kepentingan Belanda di Indonesia, pada kenyataannya Negara Indonesia Timur justru banyak membantu Republik Indonesia untuk mendapatkan kedaulatannya. Selain itu, sejak disahkannya Perjanjian Linggarjati pada Maret 1947. Permasalahan menimpa para pejuang Indonesia Timur, sebab perlawanan fisik rakyat Indonesia Timur mustahil dilakukan karena secara hukum Indonesia Timur telah diserahkan kepada Belanda.

Sejak kedatangan pasukan sekutu di Indonesia pada tahun 1945, Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia Timur sangat minimal dan hasilnya pasukan sekutu yakni Australia dapat menduduki Indonesia Timur dengan mudah, Letnan Jenderal H. J van Mook selaku wakil pemerintah Belanda bersama elemen NICA (Netherlands Indies Civil Administration) tiba di pulau Jawa pada tanggal 1 Oktober 1945. Ia kemudian merancang strategi federale politiek atau politik federal. Isi strategi ini berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara bagian Belanda. Van Mook kemudian menawarkan idenya tersebut pada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 10 Februari 1946, namun sebagian besar rakyat Indonesia dari Sumatra, Jawa, dan Madura menolak masuknya Indonesia sebagai negara bagian Belanda. (Mutawally)

NIT berdiri pada tahun 1946 melalui berbagai konferensi, konferensi diantaranya adalah di Hoge Veluwe yang mengalami kegagalan (24 April 1946), Van Mook melakukan kegiatan berunding dengan "wakil-wakil rakyat" daerah-daerah yang dikuasainya. Berlawanan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan bentuk negara kesatuan, Van Mook menghendaki negara Indonesia merupakan negara negara federal/serikat. Pada tanggal 14 Juli 1946, pihak sekutu menyerahkan urusan keamanan daerah di luar Jawa dan Sumatra kepada Belanda. (Susanti, 2013)

Makassar sejak awal abad ke-20, berada dalam pusaran kemodernan ala Hindia Belanda. Gelombang modernisasi khas Barat mulai tampak pada paroh akhir abad ke-19 dan semakin masif perkembangannya pada awal abad ke-20. Pemukiman yang teratur dan bersih, listrik, Societeit de Harmoni, dansa, pasar malam, kanal- kanal, jalan beraspal, hotel, arsitektur avantgarde, kebersihan, hingga penataan kampung (kampung verbetering) adalah beberapa yang bisa dihubungkan dengan citra modern. Mewujudkannya adalah proses yang bisa jadi menggembirakan, mengharukan dan tidak jarang mengecewakan. Cerita keriuhan acara dansa di gedung kesenian atau membaca surat kabar dan mendengarkan radio, bersanding dengan cerita keterbelakangan, diskriminasi dan

ketidakberdayaan. Kampung, jalan berlumpur, gelap, angker, dan kekerasan adalah cerita lain dibalik geliat dan mimpi modern itu. Ini bukan soal diskriminasi kolonial semata, bisa jadi dua realitas itu sesungguhnya adalah dialektika yang saling terhubung dimana makna modernitas itu bisa ditelusuri. Ketika orang-orang Belanda dan para priyayi di Jawa menikmati hedonitas benda-benda modern, di sudut kampung juga terbangun budaya pinggiran atau bahkan tandingan dengan ekspresi tersendiri . (Kuntowijoyo, 2004)

Terbentuknya Negara Indonesia Timur sendiri merupakan awal kemunduran bagi kelompok kontra federal di Sulawesi Selatan, hal inilah yang mendasari mereka yang sejak awal mendukung negara kesatuan RI (Bahri et al., 2018). Tidak ada jalan bagi mereka, kecuali untuk sementara bergabung Bersama dengan kelompok pro federal di dalam parlemen NIT untuk melanjutkan perjuangan mereka. (Najamuddin, 2000)

Perlawanan semakin meningkat dan meluas seperti di Bantaeng, Pare-pare, Makassar, seiring dengan semakin seriusnya Van Mook, selaku Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mendirikan Negara federal. Akibatnya pada 11 Desember 1946 Panglima tertinggi Angkatan Perang Hindia Belanda mengumumkan Negara dalam Keadaan Darurat dan Perang (Staat Oorlog en Beleg). (Sulistyo, 2017) Westerling memimpin pasukan khusus (Rode Baretten) melakukan operasi militer atas para pejuang kemerdekaan, akibatnya 40.000 orang menjadi korban. Mengajarkan Negara-negara Federal dianggap sebagai upaya menghidupkan , yang diyakini akan membahayakan kesatuan nasional. Namun NIT dan Negara – negara Federal lainnya diawal perjuangan kemerdekaan adalah suatu kenyataan sejarah. Di dalam Negara-negara Federal itu juga terdapat perjuangan untuk membela Negara Kesatuan.

Berdasarkan restu yang diperoleh dari Pemerintah Belanda, maka van Mook menyelenggarakan Konferensi Malino 16 Juli – 24 1946 di Makasar Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Malino oleh van Mook, di samping pertimbangan politik tentu sangat spekulatif dan konspiratif mengingat tempat ini secara geografis jauh dari jangkauan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan memanfaatkan wilayah bagian timur Indonesia yang diduduki Tentara Australia atas nama Sekutu secara politik dan keamanan tentu menguntungkannya. Konferensi ini dihadiri 39 orang anggota senat dari 15 daerah, seperti: Bali, Lombok, Riau, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Borneo Barat, Borneo Timur, Maluku Utara, Minahasa, Sangir Talaud, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Neeuw Guinea (Irian), Flores, Timor, Sumba, Sumbawa, Borneo Selatan, dan Maluku Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah- daerah di Indonesia bagian Timur (Kurniawan et al., 2021).

Sehingga pada Konferensi Malino, van Mook menawarkan sistem susunan ketatanegaraan federasi, dengan syarat bahwa bagian-bagian yang akan merupakan komponen dari federasi itu haruslah merupakan wilayah-wilayah yang luas dan mempunyai potensi ekonomi, sosial, dan politik yang kuat. Gagasan van Mook tersebut mendapat tanggapan yang positif dari delegasi Maluku Utara Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah. Bagi Iskandar Muhammad Jabir Syah pembentukan negara federal bukanlah disintegrasi, tapi suatu sistem pemerintahan yang tidak berbeda dengan negara kesatuan. (Hasyim & Mansur, 2015)

Salah satu daerah yang menolak terbentuknya NIT adalah Polongbangkeng yang merupakan daerah tingkat II Kabupaten Takalar. Selaku reaksi keras dari perencanaan NICA di bawah pimpinan Let. Gubernur van Mook untuk pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) Pada tanggal 17 Juli 1946 berlangsung

suatu musyawarah dari beberapa kelaskaran yang hadir yakni wakil-wakil dari beberapa kelaskaran. Laskar yang hadir yaitu PPNI, H.I, Kris Muda Mandar, Gapis, Amris dan LIPAN Bajeng yang dipimpin oleh Makkaraeng Dg Manjarungi. Hasilnya ialah para peserta rapat sepakat membentuk Gabungan Kelaskaran PKRI (Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia) Sulawesi dengan nama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS). (Syamsuddin, 2021)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis pendekatan sejarah. Menurut Bogdan dan Taylor (1955) mereka menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didapatkan dari hasil pengamatan perilaku orang-orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah. (Suwendra, 2018)

Dalam suatu penelitian menggunakan sebuah metode dengan tujuan agar mampu mempermudah kegiatan yang akan dilaksanakan juga lebih sistematis. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah. Dengan melalui metode sejarah ini kemudian akan dikaji lebih dalam lagi tentang keaslian sejarah, data sejarah, kebenaran/fakta sejarah, serta bagaimana dilakukan interpretasi dan inferensi terhadap sumber-sumber atau data sejarah. Metode merupakan suatu cara, prosedur, atau teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Menurut Gilbert J. Garrangan, S.J dalam bukunya yang berjudul "Guide to Historical Method" menjelaskan bahwa metode sejarah sebagai seperangkat asas dan aturan yang tersusun secara sistematis dan didesain dengan tujuan untuk membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan secara sintesis hasil-hasil yang dicapai. (Daliman, Media Penelitian Sejarah (III), 2018) Metode sejarah merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Tujuan adanya metode sejarah adalah untuk memastikan dan mengatakan kembali fakta-fakta sejarah di masa lalu. Adapun empat tahap-tahap yang digunakan dalam metode sejarah antara lain sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik (heuristics) atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde* artinya adalah langkah awal yang dilakukan dalam penelitian sejarah dengan mencari sebuah sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan data, materi atau informasi yang nyata tentang peristiwa sejarah. (Syamsuddin H. , 2016). Tahap Heuristik dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data di Polongbangkeng dengan mewawancarai beberapa narasumber selain itu peneliti juga mencari informasi di Arsip serta beberapa buku yang membahas mengenai masalah yang di kaji. Adapun tahap-tahap pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka

Studi pustaka merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian sejarah. Dalam studi pustaka ini akan dilakukan studi terhadap sejumlah bahan pustaka, baik yang berupa arsip, buku, jurnal, majalah, dan koran sejauh itu memiliki kaitan dengan topik penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian lapangan adalah mengadakan pengumpulan data secara langsung terhadap obyek yang menjadi sasaran penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan kegiatan,

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti atau terhadap lokasi penelitian. Metode observasi yang peneliti maksud

adalah mengadakan pengamatan langsung ke tempat lokasi di Polongbangkeng. Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi pada tempat/lokasi penelitian Kecamatan Polongbangkeng, Kabupaten Takalar.

d. Wawancara

Wawancara merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan wawancara terhadap orang yang dianggap berkompeten dalam objek yang diteliti yang mewakili dan dapat menggambarkan bagaimana dimanfaatkan sebagai objek pembelajaran Sejarah.

2. Kritik

Setelah melakukan kegiatan pengumpulan data-data sejarah, tahap selanjutnya yaitu kritik. Pada tahap kritik sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian disaring atau diseleksi sehingga diperoleh data-data yang nantinya bersifat objektif. Kritik terbagi menjadi dua yaitu, kritik mengenai autentisitas (kritik ekstern) dan kritik mengenai kredibilitas isinya (kritik intern).

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah kegiatan dalam penelitian sejarah dengan mencari autentisitas (keaslian) sumber sejarah yang telah dikumpulkan. (Priyadi, Metodologi Penelitian Sejarah, 2012) Jadi kritik ekstern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui asal-usul sumber sejarah tersebut apakah asli atau palsu serta melakukan pemeriksaan terhadap peninggalan atau catatan sejarah. (Sjamsuddin H. , Metodologi Sejarah (III), 2016)

b. Kritik Intern

Setelah melakukan tahap seleksi data dengan menelusuri autentisitas sumber sejarah, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik intern. Kritik intern merupakan tahap menguji kredibilitas sumber sejarah apakah sumber sejarah tersebut dapat dipercaya atau tidak.

c. Interpretasi

Setelah mengumpulkan data-data sejarah kemudian diseleksi/kritik, tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Tahap ini merupakan tahap ketiga yang dilakukan pada saat penelitian sejarah. Interpretasi merupakan kegiatan penafsiran atau pemberian makna pada fakta-fakta sejarah atau bukti-bukti sejarah. Di tahap ini merupakan salah-satu puncak yang mewarnai proses rekonstruksi peristiwa di masa lampau.

d. Historiografi

Setelah melakukan pengumpulan data-data atau sumber sejarah kemudian diseleksi dengan melalui kritik intern maupun kritik ekstern, selanjutnya interpretasi atau penafsiran fakta-fakta sejarah, maka tahap terakhir yang harus dilakukan yaitu historiografi. Jadi historiografi merupakan proses penulisan sejarah, dimana pada tahap ini peneliti akan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang sebelumnya telah kumpulkan, diuji (verifikasi) dan diinterpretasikan. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan, dengan tujuan agar fakta-fakta sejarah yang diteliti dapat diterima dan diketahui oleh para pembaca. (Daliman, Media Penelitian Sejarah (III), 2018)

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Reaksi Masyarakat Polongbangkeng dalam Menolak Kehadiran NIT di Polongbangkeng

a. Laskar Lipan Bajeng

Lipan Bajeng sebagai salah satu pelopor pendiri LAPRIS merupakan penjelmaan dari organisasi perjuangan rakyat Distrik Polongbangkeng di Palloko, ibu kota Distrik Polongbangkeng yang kemudian dijelmakan menjadi Kelaskaran

Lipan Bajeng pada 2 April tahun 1946 (Bosra, 2009). Di Polongbangkeng suatu wilayah status distrik di dalam onderafdeling Takalar, dibentuk wadah perjuangan bersenjata, yang pada mulanya diberi nama Gerakan Muda Bajeng. Tokoh yang mempelopori pembentukannya ialah Syamsuddin Dg. Ngerang, lulusan A.M.S. dan merupakan kamanakan Karaeng Polongbangkeng Pajonga Dg. Ngalle. Ia dibantu oleh Madinah Dg. Ngitung, Makkaraeng Dg. Manjarungi dan juga Fakhruddin Dg. Romo (Powiloy, 1987). Hal ini sesuai dengan pernyataan H. Muh Dg. Tompo yang mengatakan bahwa Lipan Bajeng organisasi perjuangan rakyat di Daerah Polongbangkeng, dimana salah satu tokoh yang berperan Padjonga Daeng Ngalle dan Ranggong Daeng Romo. Lipan Bajeng ini menjadi salah satu pelopor berdirinya LAPRIS.

Pelantikan pengurus dilakukan oleh M. Saleh Lahade atas nama Gubernur Sulawesi dan selaku pembicara adalah Makkaraeng Dg. Manjarungi dan Fachruddin Dg. Romo. Dalam pelantikan ini Gubernur Sulawesi mengukuhkan dan Polongbangkeng sebagai wilayah R.I. dan seluruh aparaturnya pemerintahan (sipil dan militer) berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi atas nama pemerintah Republik Indonesia menugaskan kepada Gerakan Muda Bajeng untuk menyusun pemerintahan sementara, untuk kemudian nanti disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat (Panitia Khusus Penyusun Sejarah Perjuangan Kelaskaran Lipan Bajeng, 1988).

Setelah terbentuknya Gerakan Muda Bajeng kemudian melancarkan aksinya dalam bentuk penyerangan terhadap musuh dan menangkis serangan musuh, baik di wilayah Polongbangkeng maupun di luarnya seperti Gowa dan Makassar. Setelah beberapa bulan melancarkan aksinya, nampaklah kelemahan dan kekurangannya maka dari kekurangan dan kelemahan tersebut sehingga timbullah pemikiran untuk mengembangkan gerakan ini. Padjonga Daeng Ngalle, Makkaraeng Daeng Manjarungi dan Ranggong Daeng Romo tiga orang tokoh yang memiliki banyak peran dalam Gerakan Muda Bajeng kemudian merencanakan pertemuan dalam rangka penyempurnaan dan perubahan.

Pada tanggal 2 April tahun 1945 kemudian di adakanlah pertemuan pada wilayah Rannayya Ko'mara Polongbangkeng. Dalam pertemuan ini kemudian di tetapkan perubahan nama dari Gerakan Muda Bajeng menjadi Kelaskaran Lipan Bajeng. Lipan Bajeng berasal dari istilah kata dari Lipan yang berarti jenis hewan yang suci dan bersih, hidupnya selalu dalam keadaan bersembunyi, tetapi bila tiba-tiba muncul dan menggigit maka gigitannya begitu sangat sakit sekali sedangkan bajeng adalah nama wilayah. Diharapkan kelak Lipan Bajeng yang berjuang secara gerilya akan ditakuti oleh musuhnya sebagaimana keadaannya Lipan itu sendiri.

b. Pembentukan LAPRIS

Pada tanggal 17 juli 1946 adalah tanggal dimana paling bersejarah untuk seluruh kelaskaran di sulawesi selatan, karna di tanggal tersebut deklarasi pembentukan LAPRIS dilaksanakan dan di ikuti dengan penegasan kembali keberadaan pemerintahan Republik Pemerintah Indonesia dengan mentakan bahwa terhitung mulai tanggal 5 Desember tahun 1945. Tugas dan tanggung jawab Gubernur Sulawesi Selatan diambil alih oleh pimpinan LAPRIS dan berkedudukan di Borongkaramasa Polongbangkeng sambil menunggu ketentuan lebih lanjut Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta.

Sebagai ketua umum ditunjukkan oleh Makkaraeng Dg. Manjarungi dari Lipan Bajeng, urusan ketentaraan dijabat oleh Ranggong Dg. Romo dan wakilnya seorang bekas HEIHO, R.Endang yang berasal dari Jawa Barat dan berkedudukan di Polongbangkeng. Sedangkan Riri Amin Daud, Aminuddin Muhlis, Bahang, Ali

Malaka dan Bonto bertugas membentuk organisasi pemerintahan Republik Indonesia di Kota Makassar dan menyiarkan bahwa di Polongbangkeng telah terbentuk organisasi kelaskaran " LAPRIS" serta mengadakan hubungan dengan kelaskaran lainnya untuk bergabung dengan LAPRIS. Akhirnya berdatanganlah para pemimpin kelaskaran ke Polongbangkeng dan bertemu langsung dengan Ranggong Dg. Romo sebagai panglima LAPRIS dan Makkaraeng Dg. Manjarungi sebagai Ketua Umum Organisasi Pemerintahan. Ruslan Dg. Saung mengatakan bahwa LAPRIS sebagai tempat pertemuan para Pahlawan terdahulu untuk melawan Belanda termasuk dalam rangka menentang pembentukan NIT.

2. Perlawanan LAPRIS terhadap NICA

Dalam rangka penoalakan NIT perjuangan dilakukan kurang lebih 5 tahun (1945-1950) terdapat dua bentuk yaitu perjuangan fisik dan perjuangan non fisik perjuangan ini diperiodesasikan menjadi masa Gerakan Muda Bajeng dan Lipan Bajeng bersama LAPRIS.

a. Perjuangan secara fisik

Pada periode Gerakan Muda Bajeng terjadi sekitar 13 kali kontak senjata antara pejuang dan Belanda (NICA dan KNIL) peristiwa ini terjadi pada 16 Oktober 1945 sampai 2 April 1946 kontak senjata pertama terjadi di luar Polongbangkeng tepatnya di Balangbaru Kota Makassar, pada saat itu Padjonga Daeng Ngalle memerintahkan 500 orang anggota Laskar di bawah pimpinan Sahabuddin Daeng Ngerang menuju kota Makassar untuk menyerang asrama-asrama Belanda. Pada 7 Januari 1946 tentara Belanda menyerang kubu perlawanan Gerakan Muda Bajeng di Batu Nipa Polongbankeng atas instruksi dari Makkaraeng Daeng Manjarungi 30 orang pasukan di bawah pimpinan Sarin mempertahankan kubu pertahanan.

Pada tanggal 19 Februari 1946 Mappa Daeng Temba memimpin 50 orang pasukan mempertahankan kubu pertahanan di Bontokadatto yang serang tentara Belanda, pada tanggal 20 Februari 1946 Ranggong Daeng Romo memimpin 100 orang pasukan untuk mengadakan serangan keasrama tentara di Pappa, Takalar. Keesokan harinya pada 22 Februari 1946 tentara Belanda mengadakan serangan terhadap kubu pertahanan mereka di Bontocinde.

Pada 1 Maret 1946 Ranggong Daeng Romo memimpin 100 orang anak buahnya mengadakan patroli di Pari'risi dalam perjalanan mereka bertemu dengan musuh dan berbuntut terjadinya pertempuran kemudian 3 Maret 1946 Ranggong Daeng Romo menginstruksikan kepada Mappa Daeng Temba memimpin 100 orang pejuang untuk mengadakan patroli di Bangkala Jeneponto. Pertempuran terus berlangsung hingga pada tanggal 29 Maret 1946 ketika kubu pejuang yang ada di Panjanakan di serang musuh pada saat itu kubu di pimpin oleh Sapi Daeng Nyikko.

Setelah terbentuknya Lipan Bajeng pada 2 April 1946 hingga pada terbentuknya LAPRIS pada 16 Juli 1946 Lipan Bajeng sebagai pendukung utama LAPRIS pada saat itu kedua bermarkas di tempat yang sama dan dipimpin oleh satu orang Ranggong Daeng Romo. Para pejuang segera menkonsolidasi kekuatan untuk menggalkan konferensi pemebntukan NIT, tetapi usaha ini tidak berhasil. Mereka kemudian menyusun program perjuangan jangka panjang dalm wadah LAPRIS (Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi) pada 17 juli 1946. Pada 8 Agustus 1946 markas Lipan Bajeng mendapats serangan mendadak dari musuh pada saat itu Ranggong Daeng Romo memimpin pasukannya yang berjumlah 300 orang untuk manangkis serangan. Perjuangan terus berlangsung hingga 28 februari 1947 markas besar pejuang di langgese mendapat serangan tiba-tiba. Dalam penyerangan ini terjadilah pertempuran yang mengakibatkan merenggut nyawa ketua lipan bajeng atau panglima LAPRIS (Rangong Daeng Romo) bersama 9 orang pejuang lainnya. Pimpinan lipan bajeng kemudian di

ambil alih oleh Mappadaeng Temba pada 7 maret 1947. Pada 6 agustus 1947 menjadi akhir kontak senjata antara pihak lipan bajeng dan belanda, pada saat itu Kamaruddin Daeng Pali memimpin 50 orang untuk menyerang kubu pertahanan belanda yang ada di Polongbangkeng. Sesudah penyerangan itu tidak pernah lagi terjadi kontak bersenjata dikarenakan kekuatan memang sama sekali sudah tidak seimbang lagi.

Selain organisasi kelaskaran, perjuangan di Sulawesi juga mendapat bantuan pemerintah pusat yng mengerimkan TRIPS (Tri Persiapan Sulawesi) yang pimpinan tertingginya di pegang oleh Kahar Muzakkar dan bermarkas di Yogyakarta di Daerah Sulawesi Selatan TRIPS dibagi menjadi beberapa pendaratan dan di tempat yang berbeda seperti Makassar, Gowa, Maros, Barru, Pare-pare, Pinrang, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Luwu. (Salim, 2016)

b. Perjuangan Non Fisik

Setelah perjuangan secara fisik tidak mebuahkan hasil yang di inginkan maka kemudian di lakukan perjuangan non fisik. Usaha pertama yang di lakukan iyalah membentuk satu pemerintahan Defacto yang tunduk pada pemerintahan Republik Indonesia, pemerintahan ini dibentuk pada 5 Desember 1945 di Borongkaramasa, Malolo, Polongbangkeng. Pada 19 Januari 1946 Gerakan Muda Bajeng mengirim 8 anggotanya sebagai utusan resmi dalam rangka mengadakan hubungan dengan pemerintah RI di Ibu Kota tujuan pengiriman itu untuk menyampaikan keadaan perjuangan di Sulawesi Selatan terkhusus di Polongbangkeng. Selain itu mereka juga meminta bantuan ekspedisi dari Jawa hingga pada tanggal 15 Juni 1947, Abu Baedah, Abdul Tahim Daeng Tata dan Nahola Daeng Nambung diutus dengan suatu oleh pimpinan Lipan Bajeng untuk mengadakan hubungan dengan Ibu Kota Republik. Perjuangan lainnya ialah kebijaksanaan dari pemimpin Laskar Lipan Bajeng untuk menampung dan mempersatukan para pejuang yang berasal dari luar Polongbangkeng menjadi anggota Laskar Lipan Bajeng hal ini menyebabkan anggota dari Laskar Lipan Bajeng menjadi semakin banyak.

Peristiwa perundingan bermula dari siasat licik musuh yang membujuk para pejuang agar mau bekerja sama dengan Belanda salah satu pejuang yang berhasil di bujuk ialah Baco Daeng Toma pamannya Ranggong Daeng Romo beliau kemudian membujuk pimpinan Lipan Bajeng agar bersedia untuk berunding denagn pihak Belanda hingga pada 6 Januari 1948 Karaeng Polongbangkeng yakni Karaeng Daeng Manjarungi bersedia untuk berunding dengan Belanda sebelum menyetujui perundingan tersebut terlebih dahulu di adakan rapat untuk menentukan perwakilan dari pihak Lipan Bajeng. Kemudian 6 Januari 1948 diutustlah delegasi perundingan menuju ke Bone-bone pada saat tiba disana mereka di terima oleh Kapten Van Oormerse bersama Letda Pastor dan Lerda Kaya para delegasi Lipan Bajeng kemudian di antar ke Makassar untuk menemui pimpinan tentara Belanda perundingan berlansung sampai tengah malam dan mencapai hasil yang sangat memuaskan dan diterima baik oleh kedua belah pihak

Pada 8 Januari 1948 Makkaraeng Daeng Manjarungi bersama 100 orang pasukan Lipan Bajeng berangkat di Canrego menemui tiga opsir Belanda guna menyampaikan tanggapan Karaeng Polongbangkeng dan pompinan Lipan Bajeng atas hasil perundingan yang di capai. Kemudian pada tanggal 9 januari 1948 utusan dari pimpinan militer Belanda tiba di Canrego membawa surat yang berisi permohonan agar Karaeng Polongbangkeng bersama pimpinan Lipan Bajeng di antar ke Makassar pihak Lipan Bajeng mereka di undang untuk membicarakan kelanjutan perundingan yang diadakan oleh delegasi terdahulu namun sesampainya di Makassar mereka mengetahui bahwa hal ini merupakan tipu muslihat dari Belanda.

Beberapa hari kemudian mereka di pindahkan ke penjara layang dan barulah dibebaskan pada saat adanya pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia 27 Desember 1949 dalam rangka untuk meneruskan perjuangan terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diadakanlah musyawarah besar di Polongbangkeng pada 5-7 Februari 1950 yang kemudian di kenal dengan Konferensi Polongbangkeng dalam Konferensi tersebut dihasilkanlah suatu wadah yang disebut Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (Biro PPRI) yang di pimpin oleh Makkaraeng Daeng Manjarungi, Yusuf Bauti, A. R. Tamma dan Aminuddin Muchlis. Setelah Konferensi selesai Makkaraeng Daeng Manjarungi bersama Moh. Riri Amin Daud diutus untuk menghadap pemerintah RIS di Jakarta untuk menyampaikan keinginan rakyat agar pemerintah segera membubarkan negara Boneka Belanda NIT.

3. Munculnya Penolakan NIT di Polongbangkeng

a. Negara Indonesia Timur (NIT)

Setelah mengetahui kemerdekaan bangsa Indonesia Belanda kemudian ingin menguasai kembali bangsa Indonesia salah satu cara yang dilakukan Belanda adalah dengan merealisasikan gagasan politik Federal gagasan ini di rancan oleh H. J Van Mook, dari rancangan politik Federal inilah kemudian terbentuklah Negara Indonesia Timur. Dengan menempatkan Sulawesi Selatan dan pulau-pulau di bagian Timur sebagai basis. Dengan melalui beberapa tahap pertemuan, mulai dari konferensi di Hoge Veluwe yang mengalami kegagalan pada tanggal 24 April 1946. Dari kegagalan itulah, maka diadakanlah konferensi Malino (Sulawesi Selatan) yang berfokus pada golongan pribumi dan berakhir pada tanggal 25 Juli 1946.

H.J. van Mook menyampaikan pidatonya pada pembukaan konferensi Malino bahwa hanya dengan bersatunya seluruh Indonesia dapat menjamin tercapainya dasar teguh untuk menentukan nasib diri sendiri. Serta bisa mendapatkan tempat diantara bangsa-bangsa yang ada di dunia yang kuat perekonomiannya. Tentang bentuk kesatuan dan federasi, menurut van Mook dalam pidatonya tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan memerlukan lebih sedikit biaya dan tenaga serta pimpinan yang diperlukan, dibanding dengan Negara yang berstruktur Federasi. Hanya saja dalam suatu Negara Kesatuan memiliki resiko golongangolongan (bahagian-bahagian) tertentu akan menguasai bahagian-bahagian lainnya sehingga akan timbul perpecahan di dalamnya dan akan mendatangkan bahaya bagi kesatuan tersebut. Sebaliknya, dalam suatu Negara Federasi dapat dijamin kehidupan-kehidupan dari segenap golongan-golongan (bahagian-bahagian) dan dengan demikian akan dapat ditempatkan pada suatu pembagian tugas yang tepat antara pemerintah pusat di satu pihak dan daerah-daerah di lain pihak.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1946 diadakanlah konferensi di Pangkalpinang yang dihadiri oleh wakil-wakil dari golongan minoritas yakni golongan dari peranakan Tionghoa, peranakan Arab dan golongan Belanda. Dalam konferensi Pangkalpinang memutuskan untuk menyetujui keputusan yang dihasilkan dalam konferensi Malino. (Fitria, 2013) Sebagai kelanjutan Konferensi-konferensi sebelumnya pada tanggal 7 Desember 1946 diadakanlah konferensi di Denpasar Bali yang diketuai oleh H. J Van Mook. Konferensi ini membahas mengenai status Timur Besar di dalam ketatanegaraan yang baru.

Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, terbentuklah negara baru yang dinamakan Negara Indonesia Timur dalam wadah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku. Pada tanggal 24 Desember 1946 berdasarkan peraturan ketatanegaraan yang telah diterima dalam konferensi diumumkanlah berdirinya

Negara Indonesia Timur (NIT) yang meliputi bekas wilayah Timur Besar kecuali Irian Barat.

Negara Indonesia Timur dirancang oleh Letnan Gubernur Jenderal van Mook sebagai usaha untuk melemahkan potensi RI di luar pulau Jawa dan Sumatera. Pembentukan ini sekaligus merupakan konsensi van Mook terhadap gagasan semula dari pihak Kerajaan Belanda pada tahun 1942 yang menganggap kemerdekaan bagi bangsa Indonesia masih merupakan suatu hal yang belum terjangkau. Konferensi Denpasar itu memilih Cokorda Gde Raka Sukawati sebagai

Kepala Negara Indonesia Timur pertama (mantan anggota Volksraad dari partai PEB), Perdana Menteri adalah Nadjamoedin Daeng Malewa yang merangkap sebagai Menteri Perekonomian, dan ketua DPRS terpilih Mr. Tadjoeeddin Noer. Hanya kaum republikan berpendapat bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur dalam rangka pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat hanya merupakan satu tahap dalam proses perjuangan menuju Negara Republik Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi 1945. Sementara mereka yang mendukung federalisme, memang menganggap Negara Indonesia Timur sebagai tujuan dalam rangka pembentukan Negara Federal yang tetap berada dalam lingkungan Kerajaan Belanda. (Rustan & Mustafa, 2015)

4. Awal Mula Munculnya Penolakan NIT di Polongbangkeng

Keinginan untuk kelak membentuk negara federasi hasil Konferensi Malino, mendapat tanggapan penolakan dari pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan. Karena itu pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan lebih giat melancarkan perlawanan dan serangan untuk mematahkan kekuasaan dan menghancurkan kedudukan Belanda. Usaha yang dilakukan ternyata berhasil. Keberhasilan perjuangan itu bukan hanya dinyatakan oleh R.W. Mongisidi "lapisan masyarakat pada umumnya 98% menghendaki Negara Kesatuan Indonesia (eenheids staat) dalam bentuk republik. Ini adalah suatu kenyataan sampai akhir tahun 1946".

Pihak pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan mengakui bahwa kedudukan kekuasaannya semakin merosot dan hampir tidak berdaya akibat semakin meningkatnya perlawanan dan serangan rakyat terhadap kedudukannya. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Belanda yang berkedudukan di Makassar memohon bantuan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Batavia agar mengirimkan bantuan militer dan menyatakan daerah Sulawesi Selatan berlaku hukum "keadaan perang". (Kadir Harun, dkk, 1984)

Reaksi masyarakat Polongbangkeng pada saat mengetahui keberadaan NICA di wilayah Polongbangkeng tentunya menolak hal tersebut termasuk pembentukan NIT karena menganggap bahwa NIT ini dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka untuk menolak NIT maka dibentuklah LAPRIS yang berkedudukan di Borongkaramasa di Polongbangkeng, yang diketuai oleh Kelaskaran Lipan Bajeng dan pada saat itu di wakili oleh Ranggong Dg. Romo dari Polongbangkeng. Dengan adanya LAPRIS maka semangat masyarakat Polongbangkeng dalam rangka menentang pembentukan NIT semakin berkobar para anggota LAPRIS mulai menyebarkan berita tentang kekuatan baru dalam menumpas tentaras Belanda, mereka memasang slogan-slogan anti penjajahan dan mengumumkan tentang keberadaan LAPRIS. (Lewa, 2007)

5. Dampak Penolakan Masyarakat Polongbangkeng Terhadap NIT

Kehadiran aparat NICA bersama pasukan Sekutu mendapat reaksi penolakan dari bangsa Indonesia, termasuk rakyat Polongbangkeng. Hal itu disebabkan karena mereka mendukung sepenuhnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap dukungan pada proklamasi kemerdekaan itu secara spontan tentunya didasari oleh kenyataan bahwa, selama dalam pemerintahan kolonial Belanda mereka merasakan ketidakadilan, hak mereka terkurungS dan hidup

penuh penderitaan akibat tindakan kolonial mengeksploitasi barang dan jasa mereka. Di samping itu pihak kolonial bertindak tanpa memperhatikan lingkungan kultural dari mereka.

Periode pemerintahan sekutu di Sulawesi tidak hanya dicirikan oleh munculnya gerakan rakyat menentang pemerintahan dan kekuasaan Belanda saja, tetapi juga diwarnai dengan lahirnya organisasi-organisasi kelaskaran bercorak khusus. Pada dasarnya organisasi kelaskaran yang berkembang di Sulawesi segera dapat mendirikan cabangnya di daerah pedalaman. Berdirinya organisasi kelaskaran segera dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran bangsawan dalam organisasi tersebut mendorong masyarakat dengan segera melibatkan diri sekaligus menjadi anggotanya. Hampir semua organisasi kelaskaran yang telah didirikan memuat nama-nama raja sebagai penasehat, pelindung atau sebagai pimpinan utama. Hal demikian berlaku pula pada hampir semua wilayah di nusantara, sebab raja atau bangsawan dianggap sebagai tempat bernaung masyarakat banyak sehingga sikap dan tindakan yang dilakukan raja merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan (Edward & Poelinggomang, 2004). Adapun dampak penolakan Polongbangkeng terhadap NIT adalah sebagai berikut

a. Dampak Politik

Negara Indonesia timur telah terbentuk, telah menjelma dan telah pula menjadi kenyataan. Karena kabinetnya telah tersusun lengkap dengan presiden dan Menteri-menterinya. Akan tetapi dengan terbentuknya negara Indonesia timur tidaklah menyebabkan lenyapnya rasa atau semangat kebangsaan didalam dada rakyat Indonesia yang berada dibawah tekanan pemerintah negara Indonesia timur. Bahkan adalah sebaliknya, partai-partai dan organisasi-organisasi rakyat malahan bertambah giat dan berani menentang rencana dan sisasat pemerintah belanda yang ingin Kembali menjajah negara dan rakyat Indonesia yang telah merdeka sejak tanggal 17 agustus 1945 itu. Dimana-mana kedengaran suara dari rakyat mengatakan bahwa negara Indonesia timur itu adalah negara boneka ala van mok, negara ikut tuan dan lain-lain

Meskipun negara Indonesia timur telah terbentuk, namun secara politik belum mampu mempengaruhi daerah-daerah yang menjadi bawahannya. Seperti daerah takalar yang berada di selawesi selatan , yang dimana masyarakatnya secara tegas menolak hadirnya negara Indonesia timur dan menganggap daerah takalar bukan bagian dari negara Indonesia timur melainkan secara tegas menyatakan daerah takalar merupakan bagian daripada negara republic Indonesia maka dengan itu beberapa golongan pejuang yang tersebar di beberapa daerah membentuk sebuah wadah perjuangan dengan bentuk kelasykaran. Untuk mewujudkan rencana menyatukan kelaskaran-kelaskaran yang tersebar di setiap daerah dalam satu wadah maka diusahakan satu pertemuan pemimpin-pemimpin kelaskaran. Pertemuan pertama dilakukan di Komara pada 15 Juli 1946. Hadir pada pertemuan ini pemimpin Kris Muda Mandar, Riri Amin Daud dari Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) Makassar hadir Aminuddin Muchlis dari Harimau Indonesia hadir Bahang dari Angkatan Muda Republik Indonesia Selayar (AMRIS) Selayar hadir Daeng Bonto dan dari Gerakan Tanete Soppeng diwakili oleh Ali Malaka.

Dari pertemuan ini dicapai kata sepakat membentuk organisasi gabungan kelaskaran. Keesokan harinya mereka berangkat menuju markas Lipang Bajeng. Berhubung karena rencana itu merupakan inisiatif dari Endang, maka pada pertemuan itu ia tampil sebagai pimpinan sidang. Selain dihadiri oleh tokoh-tokoh yang hadir pada pertemuan 15 Juli 1946 hadir pula pertemuan ini Ranggong Daeng Romo, Karaeng Ana Bajeng, Karaeng Loloa, Karaeng Djarung, Karaeng Cadi, Karaeng Palli, Karaeng Sidja, Karaeng Temba, Emmy Saelan, Maulwi Saelan

dan lain-lain. Pertemuan ini merupakan pertemuan pembentukan wadah kesatuan organisasi kelaskaran yang dinamakan LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi). Dari hasil pertemuan ini maka pada tanggal 17 Juli 1946 dilakukan upacara peresmian berdirinya LAPRIS yang ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Muh, Yusuf di Ranaya. Upacara ini dilakukan pada jam 09.00 dan dihadiri sekitar 100 orang. Setelah pembentukan NIT (Negara Indonesia Timur) sebagai wadah pemerintahan di wilayah Indonesia Timur, nampak bahwa perjuangan rakyat di Sulawesi Selatan khususnya di wilayah Polongbangkeng sudah lebih banyak.

Di Polongbangkeng atas inisiatif dari Makkaraeng Dg. Manjarungi, Panitia Bekas Tawanan Politik berusaha menyelenggarakan satu konferensi dengan mengundang anggota-anggota LAPRIS dan organisasi kelaskaran lainnya serta pimpinan pemerintahan Afdeling. Menurut Makkaraeng Dg. Manjarungi, konferensi ini dimaksudkan untuk membicarakan perubahan tatanan dasar perjuangan dari perjuangan militer menjadi perjuangan politik. Untuk menyelenggarakan konferensi, pengorganisasian dipercayakan kepada LAPRIS dan Lipan Bajeng, dan untuk jaminan keamanan pengawalan konferensi diserahkan kepada Mobil Brigade Ratulangi (MBR). (Kadir Harun, dkk, 1984)

Konferensi ini akhirnya dapat berlangsung pada tanggal 5-7 Februari 1950 dengan sepengetahuan KMTIT. Pada upacara pembukaan konferensi, pemerintah NIT mengirimkan wakilnya untuk hadir. Konferensi berakhir dengan membentuk suatu wadah perjuangan yang mereka namakan Biro Pejuang Pengikut Republik Indonesia (BPPRI). Landasan wadah ini dinyatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan sebagai hasil keputusan rapat.

b. Dampak Ekonomi

Pada abad ke-18 dan 19, kegiatan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan tidak banyak terekam oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan oleh sistem pemerintahan sentralistik yang dijalankan pemerintah kolonial sejak zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Kecenderungan sentralistik terus berlanjut setelah proklamasi Republik Indonesia (RI) dan pemerintah Hindia Belanda untuk menyelesaikan pertikaian antara keduanya pada masa revolusi. Pada perundingan tersebut wilayah Indonesia Timur (Sulawesi Selatan di dalamnya) "terabaikan" oleh Pemerintah RI, dengan tidak dimasukkannya ke wilayah de facto RI. (Creutzberg & Laaren, 1987) Kenyataan lain terjadi ketika Sulawesi Selatan menjadi bagian dari sistem pemerintahan federal NIT dalam bingkai Republik Indonesia Serikat (RIS) antara tahun 1946 hingga tahun 1949 yang memperlihatkan perkembangan dan perubahan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.

Takalar merupakan salah satu daerah penghasil komoditi padi, palawija, buah-buahan, ikan, dan sayur-mayur di Sulawesi Selatan. Pada masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan perekonomian di Takalar masih dalam tekanan dari Jepang. Hal tersebut dikarenakan pada masa pendudukan Jepang masyarakat tetap bertani tetapi tidak mengkonsumsinya karena semua diambil oleh Jepang. Hasil padi misalnya, rakyat yang mengusahakannya, sawahnya milik rakyat tetapi hasilnya untuk Jepang. Sesudah padinya diambil, rakyat dipaksa lagi untuk mengolahnya sampai menjadi beras (Bosra, 2009). Setelah Soekarno-hatta memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 kondisi perekonomian belum sepenuhnya membaik. begitupun pada daerah Sulawesi selatan setelah Jepang mengakhiri kekuasaannya kondisi ekonomi masih belum stabil. Ditambah kedatangan Sekutu membonceng NICA untuk memulihkan kekuasaannya kembali di negara yang baru saja diproklamkan ini.

Walaupun keadaan ekonomi masih jauh dari yang diharapkan, tetapi sejak memasuki sistem pemerintahan NIT memperlihatkan kecenderungan yang membaik. Hal tersebut ditandai dengan besarnya jumlah ekspor beras di Sulawesi Selatan.

Usaha pemerintah NIT untuk memperbaiki keadaan ekonomi setelah perang di sektor bahan makanan, adalah dengan jalan mengembalikan Sebagian tugastugas perniagaan kepada para pedagang-pedagang beras swasta. Terhitung mulai 10 Januari 1949 kepada daerah yang berkelebihan seperti Sulawesi Selatan dan Lombok dibebaskan seluruhnya dari peraturan-peraturan "ordonansi beras 1948". Dengan adanya kebebasan tersebut, maka pedagang-pedagang beras swasta mempunyai kesempatan berdagang untuk menyediakan bahan makanan bagi daerah-daerah yang berkekurangan. Hasil nyata dari perbaikan ekonomi ini ditandai dengan keberhasilan pihak swasta mengirim beras sebanyak 998 ton ke dalam wilayah NIT, termasuk 156 Ton ke New Guine dan jagung sebanyak 20 ton. (Najamuddin, 2012)

Menjelang pertengahan bulan Januari 1949 pengiriman beras semakin meningkat menjadi 200 ton beras, 750 ton lebih jagung, kacang ijo kurang lebih 750 ton ke berbagai wilayah di Negara Indonesia Timur yang kekurangan seperti: Flores, Sumba dan Timor, dan pada bulan yang sama telah dikirim sebanyak 80 ton gula pasir ke Manado (Berita Ekonomi, 15-31 Januari 1949). Dalam kurun tahun 1950-an untuk memperbaiki perekonomian dan mengembangkan praktek-praktek penyulundupan beras oleh oknum-oknum Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, perdagangan beras dikontrol langsung oleh kalangan militer terutama Panglima Angkatan Darat Territorium.

D. KESIMPULAN

1. Reaksi masyarakat Polongbangkeng pada saat mengetahui keberadaan NICA di wilayah Polongbangkeng tentunya menolak hal tersebut termasuk pembentukan NIT karena menganggap bahwa NIT ini dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka untuk menolak NIT maka dibentuklah LAPRIS yang berkedudukan di Borongkaramasa di Polongbangkeng, yang diketuai oleh Kelaskaran Lipan Bajeng dan pada saat itu di wakili oleh Ranggong Dg. Romo dari Polongbangkeng.
2. Dalam rangka penolakan NIT perjuangan dilakukan kurang lebih 5 tahun (1945-1950) terdapat dua bentuk yaitu perjuangan fisik dan perjuangan non fisik perjuangan ini diperiodesasikan menjadi masa Gerakan Muda Bajeng dan Lipan Bajeng bersama LAPRIS.
3. Adapun Dampak dari penolakan masyarakat Polongbangkeng terhadap NIT dari sisi politik ialah terbentuknya LAPRIS yang merupakan persatuan ke-19 laskar di Sulawesi Selatan yang berfokus pada penolakan pembentukan NIT. Adapun dampak dari sisi ekonomi ialah ditandai dengan besarnya jumlah ekspor beras di Sulawesi Selatan terkhusus di daerah Polongbangkeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrymarthanino, V. (2021, Juni Kamis). Negara Indonesia Timur.
- Asir, A. (2014). Agama Dan Fungsinya dalam kehidupan ummatnya. *Penelitian dan pemikiran keislaman*.
- Asri, H. (2006). Menguak Sejarah Mencari Ibrah: Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik Bandung. 15.

- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*.
- Bahri, B., Bustan, B., & Tati, A. D. R. (2018). *Democracy Values on Learning Local History of South Sulawesi*.
- Bahri, B., Bustan, B., & Tati, A. D. R. (2020). EMMY SAELAN: PERAWAT YANG BERJUANG. *Al-Qalam*, 25(3), 575-582.
- Bosra, M. (2009). *Laskar Lipang Bajeng*. Yogyakarta: Ombak.
- Deepublish Publisher. Bambang Sulistyo. (2017). *Lensa Budaya*, 3.
- Daliman. (2018). *Media Penelitian Sejarah (III)*. Ombak.
- Darwis. (2017). *Perjuangan Andi Depu dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indoensia di Mandar 1945-1950*. Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Aluddin Makassar.
- Daud, R. A. (n.d.). *Tentang Kelaskaran Perjuangan Kemerdekaan Indonesia No. Reg 499*.
- Edward, L., & Poelinggomang. (2004). *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Fitria, S. A. (2013). Negara Indonsia Timur 1946-1950. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 593-595.
- Gertz, C. (1977). *Agama dan Kebudayaan*. Bumi Aksara.
- Harun, K. (n.d.). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945)*.
- Kadir Harun, dkk. (1984). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950)*. Ujung Pandang: Kerjasama BAPPEDA Tk I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin.
- Kasman, R. (2016). *Budaya Maritim Buton dipantai barat Serum*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Kurniawan, R., Bahri, B., & Asmunandar, A. (2021). Persebaran To Lotang Setelah Aksi DI/TII di Kabupaten Sidenreng Rappang 1966-2018. *Pattingalloang*, 8(1), 62-74.
- Lewa, T. M. (2007). *Polombangkeng dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia*. Takalar: Yapensi.
- Hasyim, R., & Mansur, M. (2015). Sultan Ternate Iskandar Jabir Syah Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950. *Etnohistori*, 4.
- Heleludidin, & Wijaya, H. (2019). *Analasis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Q Praktek, Sekolah Tinggi Theologia Jaffary*.
- Kuntowijoyo. (2004). *Raja, Priyayi, dan Kawula*. Yogyakarta: Ombak.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif (C. Anwar (ed))*. Zifatama Publisher. Margono.
- Mutawally, A. F. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- (n.d.). Negara Indonesia Timur: Dari Negara Federasi Hingga Integrasi Dalam Republik Indonesia (1946-1950). *osf.io/h7j3*, 2.
- Najamuddin. (2000). *Sulawesi Selatan Pergumunan Antara Negara Federal Dan Negara Kesatuan 1946-1949*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Priyadi. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Ombak.
- Priyadi. (2012). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Ombak.
- Penerangan, K. (1953). *Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar: Juantara Penerangan R.I Provinsi Sulawesi Selatan.
- Powiloy, S. (1987). *Arus Revolusi Sulawesi Selatan, Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Suawesi Selatan*. Ujung Pandang: Dewan Harian Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 1985-1989.
- Rustan, H., & Mustafa, M. (2015). Sultan Ternate Jabir Syah : Dari Konferensi Malino hingga menjadi Menteri dalam Negeri Negara Indonesia Timur(NIT) 1946-1950. *Jurnal Etnohistori*, 29-30.

- Salim, A. (2016). *Prasejarah Kemerdekaan di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Deepublish
- Sjamsuddin, H. (2016). *Metodologi Sejarah (III)*. Ombak.
- Suharno, & Retnoningsih. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Semarang: Widya Karya, h.
- Sulistyo, B. (2017). Beberapa Catatan Tentang Sejarah Negara Indonesia Timur. *Lensa Budaya*, 3.
- Susanti, A. F. (2013). NEGARA INDONESIA TIMUR 1946-1950. *Avatara*, 3.
- Suwendara. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*. In (A. L Manuaba (ed)) *Nilacakra Publishing House*.
- Syamsuddin, K. (2021). *Takalar Pada Masa NIT (1946-1950)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Wibisono, D. (2008). Riset Bisnis. PT Gramedia Pustaka. <https://doi.org/978-97922-00280>.

